



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Page 7315-7326

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Optimalisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya dalam Mensukseskan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya 2024

Samuel Indrayana

Universitas Bhayangkara Surabaya

Email: indrayana@ubhara.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan dan persiapan pemilihan Kepala Daerah Kota Surabaya oleh KPU kota surabaya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemilu tidak luput dari peran penting serta kerja keras antar personil di KPU Kota Surabaya dalam menyelesaikan berbagai tahapan-tahapan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berlanjutan dan proses penyelenggaraan Pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden maupun pemilihan Kepala Daerah calon walikota dan calon wakil walikota Kota Surabaya 2024. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh sebuah negara. Salah satu negara yang menggunakan paham demokrasi adalah Negara Indonesia dimana sistem kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan masyarakat. Data pemilih dalam Daftar pemilih tetap (DPT) akan terus terjadi dalam terselenggaranya pemilihan umum yang diadakan dalam kurun waktu 5 tahun sekali, maka membuat permasalahan yang terjadi pada pengambilan serta pengelolaan data pemilih.

Pemilu merupakan kegiatan yang dilakukan secara nasional untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta anggota legislatif, sedangkan Pilkada ialah pemilihan yang dilakukan secara local dalam memilih Kepala Daerah baik itu Gubernur, Bupati ataupun Walikota secara langsung diatur dalam UU No.1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU. Pasal 1 ayat (1) dikatakan: "Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dan mempunyai tugas, wewenang, serta kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum Lembaga Legislatif Pemilihan umum. Pemilu Mewujudkan

terciptanya pengelolaan data pemilih yang berkualitas. Upaya yang digunakan oleh KPU Kota Surabaya dalam Mengelola Data Pemilih dalam Rangka Mendukung Pemilihan Umum yaitu dengan mentaati Standard Operating Procedure atau SOP pada proses penginputan data pemilih dan mensosialisasikan proses pemilu ke pemilih milenial dan Masyarakat Kota Surabaya.

Kata Kunci: *Optimalisasi, Pemilihan Umum*

Abstract

The aim of this research is to find out the success of the implementation of the general election and preparation for the election of the head of the district of Surabaya by the KPU of the city of Surabaya aimed at improving the effectiveness of the election performance not without the important role as well as the hard work between the staff in the KPU of Surabaya in completing the various stages in accordance with the mandate of the Law No. 06 Year 2020 mandating to KPU to carry out the updating of the voter list continuously and the process of holding the General Election of the candidate president and vice president and the elections of the Head of the District of candidate mayor and candidate deputy mayor of Surabaya 2024. General elections are a party of democracy held by a country. One of the countries that uses the notion of democracy is the State of Indonesia where the sovereign system and the highest power is in the hands of the people. Voter data in the Permanent Voter List (DPT) will continue to occur in the course of general elections held in the past five years once, then creating problems that occur on the picking up and management of voter data.

Elections are the activities carried out nationally to elect the President and Vice President as well as the members of the legislature, while Pilkada is the election conducted locally in electing the Head of the District whether Governor, Mayor or Mayor directly regulated in the Law No.1/2015 on the Establishment of Government Regulations Replacing the Act No. 1 of 2014 on the Election of Governors, Governors and Mayors into the Law. Article 1 paragraph (1) says: "The election of Governor and Mayor is the implementation of the sovereignty of the people in the provinces and districts/cities to elect Governors. The General Election Commission of the City of Surabaya is the organizing body of general elections of a national, permanent, and independent nature and has the duty, authority, as well as the obligation to arrange the general election of the Legislative Body of General Elections. Election Implement the creation of quality voter data management. The efforts used by KPU Kota Surabaya in managing the voter data in order to support the General Election is by adhering to the Standard Operating Procedure or SOP on the process of entering the voters data and socializing the electoral process to the millennial voters and the Society of Kota Surabaya.

Keywords: *Optimization, General Election*

PENDAHULUAN

Politik (dari bahasa Yunani: politika, urusan kota) adalah kumpulan kegiatan yang terkait dengan pengambilan keputusan kelompok atau bentuk interaksi kekuasaan lainnya antara individu, seperti distribusi sumber daya atau status. Ilmu politik adalah disiplin ilmu sosial. Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh sebuah negara. Salah satu negara yang menggunakan paham demokrasi adalah Negara Indonesia dimana sistem kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan masyarakat. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Negara Indonesia bisa disebut sebagai negara demokratis yang artinya menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan pemilu. (Wardhani, 2018)

Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya merupakan lembaga pengelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dan mempunyai tugas, wewenang, serta kewajiban menyelenggarakan pemilihan umum Lembaga Legislatif Pemilihan umum. Pemilu Mewujudkan terciptanya pengelolaan data pemilih yang berkualitas. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kota Surabaya (Halimil Fathi, 2020). Pelaksanaan pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden maupun Pemilihan Umum kepala daerah kerap kali menjadi momen yang paling dinanti karena akan ada pergantian pemimpin baru yang diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi semua masyarakat Indonesia serta menjadi sosok yang dapat mendorong kemajuan dalam berbagai aspek seperti aspek perekonomian, aspek pembangunan dan aspek lainnya di suatu wilayah.

Keberhasilan pelaksanaan pemilihan umum yang dilakukan oleh KPU kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemilu tidak luput dari peran penting serta kerja keras antar personil di KPU Kota Surabaya dalam menyelesaikan berbagai tahapan-tahapan sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020 mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berlanjutan. Peran personil atau jajaran di KPU Kota Surabaya sangat memiliki peran penting dalam rangka meningkatkan efektivitas kinerja pemilu yaitu pada subbagian perencanaan & program tugas serta tanggung jawab tidak hanya seputar pemutakhiran data akan tetapi mengerjakan data anggaran serta mengerjakan logistic dan handle teknis secara otomatis dan segala pekerjaan tetap dikontrol oleh sekretaris KPU Kota Surabaya. Selain itu adapun tenaga pendukung yang bertugas membantu penginputan dan pengelolaan data pemilih, tahapan pelaporannya pada awal bulan maka akhir bulan harus melakukan

pelaporan hasil rekapan ke provinsi, jadi sebagai tenaga pendukung setiap tugas akan di periksa oleh kasubag dan juga divisi, sebelum akhirnya dilaporkan ke provinsi sebagai bahan acuan pemilihan umum berkelanjutan serta dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas kinerja pemilu.

Upaya yang digunakan oleh KPU Kota Surabaya dalam Mengelola Data Pemilih dalam Rangka Mendukung Pemilihan Umum yaitu dengan mentaati Standard Operating Procedure atau SOP pada proses penginputan data pemilih. Adapun dalam Program penelitian terdapat berbagai tahapan yang dilakukan oleh KPU Kota Surabaya dalam mengelola data pemilih yang merupakan proses kebijakan-kebijakan program agar berjalan secara maksimal. Adapun beberapa hal dibutuhkan input menghasilkan data yang baik proses pemutakhiran data pemilih seperti Data pemilih. Pengelolaan data pemilih dilakukan berdasarkan Amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 yang kemudian diubah menjadi UU No. 06 Tahun 2020 mengamanatkan kepada KPU untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih secara berkelanjutan ini menjadi penting agar pemilih nanti yang ditetapkan menjelang pemilihan pemilu berikutnya menjadi sangat bagus, karena sering kali sebuah aktivitas maupun momentum itu.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang bersifat kualitatif. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dimana data diperoleh lalu di olah secara mendalam. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan Wawancara. Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian, data yang bisa berupa data primer maupun data sekunder. Arikunto (2006:151) mengemukakan metode penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian, karena dengan pemilihan metode yang tepat dalam penelitian, akan menentukan keberhasilan suatu penelitian dan akan memperjelas langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penelitian tersebut. Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya yang beralamatkan di Jl. Adityawarman 87 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60242. Lokasi ini menjadi dasar penelitian karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab menangani pemilihan umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pesta demokrasi yang dilakukan oleh sebuah negara. Salah satu negara yang menggunakan paham demokrasi adalah Negara Indonesia dimana sistem kedaulatan dan kekuasaan tertinggi terletak di tangan masyarakat. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Negara Indonesia bisa disebut sebagai negara demokratis yang artinya menganggap pemilu sebagai suatu lambang sekaligus tolak ukur utama dalam demokrasi. Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan landasan pemilu. (Wardhani, 2018).

Kota Surabaya bersiap akan mengadakan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) pada 2024. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menyusun rencana anggaran pilwali, termasuk untuk pengamanan.

Dikutip dari laman website <https://jatim.bpk.go.id/>, Rencana anggaran untuk Pilwali Surabaya melalui dana hibah yang bersumber dari APBD Surabaya., Kepala Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, alokasi anggaran pengamanan sebesar Rp 20 miliar untuk aparat TNI dan Polri. tahun ini, tahap Pilwali 2024 belum berjalan. KPU Surabaya juga masih menunggu keputusan KPU RI terkait tahap itu. Sebab, jadwal tahap pilkada akan berjalan serentak se-Indonesia. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mulai melakukan sosialisasi tahapan dan jadwal Pemilu 2024 kepada masyarakat di Kota Pahlawan, Jawa Timur. Menurut Naafilah Astri Anggota KPU Kota Surabaya mengatakan, sosialisasi tersebut sebagai tindak lanjut dari KPU RI yang meluncurkan Tahapan Pemilu 2024 tanggal 14 Juni 2022. KKPU Kota Surabaya bersama Forkopimda dan stakeholder juga meluncurkan tahapan pemilu di kantor KPU Surabaya. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Legislatif dan Pilpres 2024 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 meliputi perencanaan program dan anggaran, serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan 14 Juni-14 Desember 2023. Selain itu, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pada 14 Oktober 2022 sampai 21 Juni 2023, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu pada 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022, penetapan peserta pemilu 14 Desember 2022. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan pada 14 Oktober 2022 hingga 9 Februari 2023, pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada 6 Desember 2022 hingga 25 November 2023. Secara umum KPU Kota Surabaya telah siap. Bahkan, persiapan telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Termasuk dalam proses penguatan kapasitas SDM,

Peserta calon KPPS bisa mendaftar langsung ke kelurahan atau sekretariat PPS secara manual."SDM itu tentunya sangat banyak, sehingga KPU Kota Surabaya butuh masyarakat yang memenuhi syarat. Silakan mendaftarkan diri di PPS atau di sekretariat PPS atau di kelurahan untuk bersama-sama kita mengusung pemilu, KPU Surabaya juga mengantisipasi hal-hal krusial lain. Berkaca dari pesta pemilu 2019 yang cukup banyak menelan korban jiwa karena KPPS kelelahan. Untuk itu pihaknya meminta surat keterangan sehat. Usia KPPS juga dibatasi maksimal 55 tahun. Karena anggota KPPS yang meninggal pada pemilu 2019 rata-rata berusia di atas 51 tahun.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 10 lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di lima wilayah kecamatan, hari Sabtu tanggal 24 februari 2024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya menggelar pemungutan suara ulang (PSU) di 10 lokasi tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di lima wilayah kecamatan.

Komisioner Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kota Surabaya Naafilah Astri Swarist mengatakan pelaksanaan PSU di 10 TPS merupakan rekomendasi yang diberikan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) setempat. Bawaslu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pengawasan, 10 TPS itu ada di Kecamatan Simokerto, Tandes, Asem Rowo, Gayungan, dan Dukuh Pakis," kata Naafilah usai meninjau PSU di TPS 27 Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto. Dia menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, penyebab digelar PSU di TPS 27 karena adanya oknum pemilih yang tidak masuk ke dalam DPT, DPTb, maupun DPK namun bisa menyalurkan hak pilihnya pada tanggal 14 Februari 2024. jika di Kecamatan Simokerto ini ada penggunaan hak pilih yang tidak sesuai, jadi menggunakan hak pilih di sini namun tidak masuk daftar," oknum pemilih tersebut pun diduga menggunakan hak pilih orang lain. Pemilik hak pilih yang masuk DPT itu hadir, lalu protes ke pengawasan Bawaslu. Kalau di sini ada lima jenis surat suara. Memastikan keamanan obyek vital,

Disisi keamanan KPU Kota Surabaya bekerjasama dengan Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Pasma Royce bersama pejabat utama Polrestabes Surabaya kunjungi kantor KPU Kota Surabaya, kantor Bawaslu dan Gudang Logistik Pemilu. Dalam kegiatan tersebut, Kapolrestabes Surabaya berkoordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu terkait perkembangan situasi pada tahapan Pemilu calon Presiden dan calon wakil presiden tahun 2024 maupun pemilihan Kepala Daerah calon walikota dan wakil walikota surabaya bulan november 2024 untuk menjaga gudang Logistik kotak suara memastikan situasi aman dan Kapolrestabes Surabaya juga mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan personel di beberapa obyek vital termasuk gudang logistic KPU di beberapa Kecamatan di Kota

Surabaya. Untuk gudang logistic Pemilu kami siagakan personel 24 jam setiap hari bergantian termasuk melibatkan personel dari Polres Pelabuhan Tanjungperak. Kedepan kata Kapolrestabes Surabaya juga akan tetap melaksanakan koordinasi dengan KPU Kota Surabaya dan Bawaslu Kota Surabaya sebagai penyelenggara Pemilu terkait persiapan pengamanan Pemilu 2024.

Sedangkan temuan – temuan permasalahan untuk penyebab Pemungutan Suara Ulang, salah satunya adanya surat suara dari daerah pemilihan (dapil) dua yang masuk atau tersisip ke dapil lima. dari Bawaslu memberikan rekomendasi PSU untuk jenis DPRD Kota Surabaya, karena yang tertukar dapil itu.

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024. Penandatanganan NPHD tersebut dilakukan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada tanggal 10 November 2023. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu mengatakan, penandatanganan NPHD berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) No 900.1.9.1/ 16888/Keuda. Surat tertanggal 2 November 2023 tersebut perihal tentang percepatan penandatanganan NPHD untuk kegiatan Pilkada Tahun 2024. Sesuai surat Kemendagri, NPHD ditandatangani paling lambat 10 November 2023. Tapi penggunaan anggarannya, baru boleh digunakan setelah tahapan (Pilkada 2024) ditetapkan menurut Maria Ekawati Rahayu di kantornya, Selasa tanggal 21 november 2023. total nilai dana hibah yang diberikan pemkot kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya untuk Pilkada 2024, sebesar Rp114,551 miliar. Dana tersebut akan dicairkan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama sebesar Rp51,382 miliar dan tahap kedua Rp. 63,169 miliar. Sementara itu, total dana hibah yang diberikan pemkot kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Surabaya untuk Pilkada 2024, sebesar Rp. 32,642 miliar. Besaran dana tersebut juga akan dicairkan dalam dua tahap. "Untuk tahap pertama sebesar Rp. 11,101 miliar dan tahap kedua Rp. 21,532 miliar. Nilai hibah untuk penyelenggaraan Pilkada 2024, pendanaannya dilakukan melalui sharing anggaran bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur. Sebab, Pilkada 2024 juga dilaksanakan serentak bersama dengan Pemilihan Gubernur (Pilgub). Karena Pilkada 2024 ini serentak, baik itu pemilihan gubernur, wakil gubernur, wali kota maupun wakil wali kota, maka pendanaannya sharing, antara Pemprov dengan pemerintah kabupaten/kota,

jika dana hibah untuk Pilkada 2024, dicover melalui APBD Surabaya 2023 dan APBD 2024. Oleh sebabnya, pencairan dana hibah untuk Pilkada 2024 ini dilakukan melalui dua tahapan. Jadi pencairannya dua tahap. Di tahap pertama itu pencairannya di 14 hari setelah ditandatangani NPHD, hibah dicairkan minimal 40 persen dari total anggaran hibah dan

sisanya nanti (60 persen) di APBD 2024, Ketua KPU Kota Surabaya, Nur Syamsi menyebutkan bahwa anggaran Pilkada 2024 mengalami peningkatan dari pelaksanaan di tahun 2020. Saat tahun 2020, jumlah anggaran yang disetujui antara KPU dan pemkot sebesar Rp101,244 miliar. Kenaikan anggaran Pilkada Surabaya tahun 2024 lantaran faktor peningkatan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Total DPT di Kota Surabaya untuk pelaksanaan Pilkada 2024 mencapai 2.218.586 jiwa. Sedangkan pada pelaksanaan Pilkada 2020 mencapai 2.089.027 jiwa. KPU hitung berapa jumlah anggaran yang disepakati antara pemkot dan KPU dibanding dengan jumlah DPT, sehingga ketemu rasio per pemilih berapa..Sebagai informasi, jumlah DPT Kota Surabaya pada Pilkada 2024, mencapai 2.218.586 jiwa. Jumlah tersebut, terdiri dari 1.078.001 pemilih pria dan 1.140.585 pemilih wanita yang tersebar di 31 wilayah kecamatan Kota Surabaya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, Jawa Timur minta seluruh pemilih pemula menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum (pemilu) yang digelar pada 14 Februari 2024. Menurut pernyataan dari Komisioner KPU Kota Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM Subairi mengatakan sosialisasi kepemiluan sudah rutin digelar oleh panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK). Sosialisasi secara masal dan masif, tentunya itu dalam rangka meningkatkan partisipasi, PPS dan PPK, tak hanya menasar lokasi umum, namun hingga masuk ke sekolah, tujuannya adalah memberikan edukasi kepada pemilih pemula terkait pentingnya penyampaian hak suara saat pemilu. Tak hanya sekolah, penyuluhan kepemiluan turut dilakukan di tempat yang acap kali menjadi jujukan para anak muda untuk menghabiskan waktu senggang. "Kemarin itu teman-teman juga ke warkop (warung kopi). Para pemilih pemula menunjukkan animo saat mendapatkan materi terkait pesta demokrasi, baik dari PPS maupun PPK. Oleh karena itu, KPU Kota Surabaya berharap anak-anak muda yang baru menjadi pemilih pemula bisa hadir menyuarkan hak pilihnya di 14 Februari 2024.



KPU Kota Surabaya menambahkan animo dari para anak muda tak hanya muncul dalam konteks pemilih, namun mereka juga banyak yang menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS). Bahkan di KPPS kemarin itu ada juga yang sampai menjadi cadangan, misalnya tujuh orang anak muda itu ada dua atau empat orang jadi cadangan kalau dikalikan total 8.167 TPS untuk KPPSnya, maka jumlahnya luar biasa. KPU Kota Surabaya optimistis tinggi animo para pemilih pemula maupun anak muda yang memang sudah punya hal pilih sejak pemilu edisi sebelumnya, bisa berdampak pada persentase partisipasi. Kalau target nasional itu kalau sekitar 70 persen, jadi pemilu skalanya nasional berbeda lagi kalau pemilihan kepala daerah (pilkada).

Berdasarkan data dari KPU setempat jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Kota Surabaya untuk Pemilu 2024 mencapai 2.218.586 pemilih dengan rincian 1.078.001 pria dan 1.140.585 perempuan. Jumlah pemilih dari kalangan generasi Z di wilayah setempat mencapai 466.103 jiwa, posisinya di bawah pemilih dari generasi milenial sebanyak 717.345 jiwa dan generasi X sejumlah 657.725 jiwa.

Diketahui, masa kampanye Pilpres 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

SIMPULAN

Dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjadi fokus utama dalam menyiapkan KPU dan Bawaslu untuk memastikan kesuksesan Pemilu Serentak 2024. Dalam konteks ini, kunjungan kerja reses menjadi momentum untuk merencanakan Pemilu 14 Februari dan Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024, mengukuhkan sejarah pertama pelaksanaan Pemilu dan Pilkada pada tahun yang sama. Dengan 31.402.838 warga Jawa Timur terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024, yang melibatkan pemilih reguler dan lokasi khusus. Jumlah DPT mencakup 15.495.556 pemilih laki-laki dan 15.907.282 pemilih perempuan, tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 666 Kecamatan, 8.494 Desa/Kelurahan, dan 120.666 Tempat Pemungutan Suara (TPS). DPT tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 666 Kecamatan, 8.494 Desa/Kelurahan, dan 120.666 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dalam menghadapi kompleksitas Pemilu Serentak, rencana pengiriman logistik ke tempat-tempat terpencil melalui kapal-kapal juga telah ditinjau. Selain itu, kerja sama lintas stakeholder dan dukungan penuh, persiapan dan kesiapan Pemilu Serentak 2024 di Jawa Timur diharapkan menjadi perwujudan yang baik, mencerminkan kompleksitas dan besarnya demokrasi Indonesia. Jaringan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten kota Jawa Timur yang begitu membantu kemudian juga jaringan Forkopimda (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah), dimana semua terlibat di dalam rangka sukses Pemilu 2024,

isu strategis yang diampu KPU Kota Surabaya seperti pemutakhiran daftar pemilih, Pendidikan pemilih, pengendalian media digital, dan peran serta masyarakat. Berdasarkan data per Oktober 2022, 315379 penduduk telah melakukan rekaman KTPel atau 99.86% dari jumlah penduduk. Data pemilih juga harus bersifat terbuka, dapat diakses masyarakat serta ada jaminan kerahasiaan dan keamanan data pribadi.

Ketua KPU Kota Yogyakarta menjelaskan bahwa minat masyarakat berperan serta sebagai penyelenggara pemilu khususnya di tingkat PPS PPK meningkat disbanding pemilu sebelumnya yang dilakukan perpanjangan pendaftaran karena rendahnya pendaftar. Untuk Kemantren Gondokusuman sendiri, 15 orang mendaftar untuk mengisi 5 posisi PPK. KPU Kota Yogyakarta menetapkan rencana jadwal pembentukan panitia adhoc. Pembentukan PPK 20 November 2022 – 16 Desember 2023, PPS akhir desember 2022 – 12 Januari 2023. Masa kerja PPK 4 Januari 2023 – 1 April 2024, PPS 16 Januari 2023 – 1 April 2024.

Setiap persoalan dapat pemilihan umum hal itu memang diselesaikan dengan komunikasi dan menjadi kendala yang cukup edukasi yang tepat, misal terhadap

memprihatinkan karena segala aktivitas kendala recruitment KPPS maka lakukan yang dilakukan akan berkontak fisik dengan pendekatan ke RT/RW setempat secara langsung dengan masyarakat, supaya mereka juga turut berpartisipasi sedangkan pemerintah mengeluarkan merekomendasikan warganya yang berbagai peraturan seperti harus menjaga memang memenuhi syarat.

KPU Kota Surabaya harus melakukan kajian ulang secara mendalam terkait proses pemilu lebih sederhana memudahkan pemilih pemula dan lansia. Tentu ini menjadi penting untuk dibahas secara serius dan melahirkan proses pemilu yang demokratis. Untuk mengatasi biaya penyelenggaraan pemilu yang terlalu membebani APBN/APBD, hendaknya KPU Kota Surabaya dapat mencari alternatif solusi yang tepat untuk pelaksanaan pemilu dapat berlangsung dengan efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Bidiarjo, Miriam. 2009. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka. Jakarta.

Firmanzah. 2008. Mengelola Partai Politik. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

Hakim, Abdul aziz. 2011. Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

KPU Kota Surabaya. (2021). KPU Provinsi Jatim Gelar Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Juni Bersama KPU Kabupaten / Kota dan Stakeholder. Kpu-surabayakota.go.id,1.

Moloeng, Lexy J. 2005. Metode Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Bandung

Suharizal. 2011. Pemilukada; Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Wardhani, P. S. (2018). Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, 58-59